

***Local Governance* dalam Merespons Isu dan Ancaman ISIS:**

Kasus di Kota Malang

Najamuddin Khairur Rijal*

nkhairurrijal@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengenai bagaimana sinergitas multi aktor di Kota Malang dalam merespons isu dan ancaman ISIS di level lokal. Sebagaimana dipahami bahwa ISIS merupakan ancaman global di mana ideologinya telah menyebar, bahkan hingga di Kota Malang. Untuk itu, keterlibatan dan sinergitas multiaktor dalam kerangka *local governance* menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan deskriptif. Data difokuskan pada temuan di lapangan yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara. Penelitian menemukan bahwa aktor publik dan aktor non-publik di level Kota Malang cukup sinergis dalam merespons isu dan ancaman ISIS. Namun, adanya perbedaan pandangan dan persepsi ancaman antara aktor publik (terutama Pemkot) dengan *stakeholders* perguruan tinggi menjadi tantangan tersendiri.

Kata Kunci: *ISIS, Local Governance, Sinergitas Multi Aktor*

Abstract

This paper study about how multi actors in Malang City synergy to response ISIS's threat and issues. As we known, ISIS as a global threat and its ideology has spreading even to the Malang City. So, the multi actors involvement and synergy with framework of local governance is important thing. This research used qualitative methods with aimed descriptive. Data focused on the field research with direct technique by means of interview to many informants. The found of this research is that public actors and non-public actors in the level of Malang City has synergy to response ISIS's threat and issues. However, the challenge is that dissimilarity opinion and threat perceptions between public actors (especially local government) and university stakeholders.

Keywords: *ISIS, Local Governance, Multi Actors Synergy*

Pendahuluan

Tulisan ini mengkaji mengenai bagaimana sinergitas multi aktor di Kota Malang dalam merespons isu dan ancaman Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) di level lokal. Sebagaimana dipahami, eksistensi ISIS telah menciptakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. International Criminal Court menyebut ISIS telah melakukan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) melalui pembantaian, pembunuhan massal, perbudakan, dan berbagai tindakan radikal lainnya (Branco, 2014). Atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan,

* Korespondensi: Najamuddin Khairur Rijal, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UMM. Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Hp. 085255637010, email: nkhairurrijal@gmail.com

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan ISIS organisasi terorisme internasional atau terorisme global yang harus dilawan oleh setiap negara.

ISIS bukan lagi sekadar gerakan lokal di Irak dan Suriah, namun telah menyebar ke berbagai negara. Tujuan ISIS adalah mendirikan kekhilafahan Islam di Irak dan Suriah, dua wilayah yang memiliki nilai historis bagi peradaban Islam. Untuk mewujudkan tujuan politisnya tersebut, ISIS melakukan propaganda dan doktrinisasi untuk mengajak umat Muslim dunia melakukan jihad membantu perjuangan mereka dalam mendirikan Negara Islam. Data National Counter Terrorism Center AS pada Februari 2015 menyebutkan bahwa lebih dari 20.000 pejuang asing (*foreign fighters*) yang berasal dari lebih 90 negara telah melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan ISIS (Crawford, 2015).

Fakta di atas menunjukkan bahwa ISIS telah menjadi gerakan transnasional. Menurut Berger (2014), perkembangan ISIS menjadi gerakan transnasional tidak terlepas dari kemampuannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi via internet dan jejaring media sosial secara efektif. Hal itu dibuktikan dengan persebaran ideologi dan doktrin “jihad” ISIS di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang tidak terlepas dari pemanfaatan instrumen teknologi komunikasi modern melalui internet dengan berbagai fituranya. Dalam konteks Indonesia, misalnya, pada 23 Juli 2014 beredar video di *Youtube* berjudul “Join the Ranks” yang berisi seruan jihad untuk mendukung ISIS, yang kemudian diikuti dengan banyaknya simpatisan yang mendukung ISIS di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Surabaya, Ngawi, Solo, Surabaya, Malang, Makassar, Poso, dan Bima (Nugroho, 2014).

Indikasi penyebaran ideologi ISIS di Indonesia selanjutnya direspons oleh pemerintah Indonesia yang saat itu di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak 4 Agustus 2014, pemerintah secara resmi melarang ISIS, baik secara formal maupun informal. Pemerintah memandang bahwa ideologi ISIS bertentangan dengan ideologi Pancasila dan ajaran Islam *mainstream* yang dianut mayoritas rakyat Indonesia serta tidak sejalan dengan kondisi keberagaman (multikulturalisme) yang ada di Indonesia (Martel, 2014).

Respons pemerintah pusat tersebut selanjutnya ditindaklanjuti di level provinsi dan kabupaten/kota. Provinsi Jawa Timur, misalnya, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Larangan ISIS.

Munculnya Pergub tersebut didasarkan karena, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Zainal Muhtadien, wilayah Jawa Timur dipandang sebagai “rahim” terorisme dan juga perkembangan paham revivalisme Islam, termasuk ISIS (Sudarmojo, 2014; Nugroho, 2014).

Dalam konteks Jawa Timur, Pergub tersebut menjadi landasan legal dalam merespons isu dan ancaman ISIS di level kabupaten/kota. Karenanya, menjadi menarik kemudian untuk mengkaji bagaimana sinergitas berbagai *stakeholders* dalam merespons isu dan ancaman ISIS di level kabupaten/kota. Dalam merespons isu dan ancaman ISIS, pemerintah daerah (*local government*) jelas tidak bisa bekerja sendiri melainkan dibutuhkan sinergitas dan kerja sama antar berbagai aktor. Untuk itu, diperlukan *local governance* yang melibatkan sinergitas multi aktor dari berbagai *stakeholders*.

Jika *local government* merujuk pada institusi atau entitas spesifik dalam sebuah wilayah geografis yang relatif kecil sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam memberikan pelayanan, maka *local governance* merupakan konsep yang luas dan didefinisikan sebagai formulasi dan pelaksanaan aksi kolektif pada tingkat lokal. Jika *local government* merujuk pada struktur institusi formal dan proses pembuatan kebijakan di level lokal, maka *local governance* merupakan bentuk upaya penguatan koordinasi dan kerja sama antara aktor publik dan aktor non-publik untuk merespons kebutuhan masyarakat pada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan usaha *local government* sendiri (Shah, 2006).

Oleh karena itu, dalam konteks ini, *local governance* dilihat sebagai koordinasi vertikal dan horizontal yang dilakukan oleh pemerintah lokal sebagai usaha penguatan upaya dalam merespons isu dan ancaman ISIS. Adapun yang dimaksud dengan aktor publik dalam konteks ini adalah aktor-aktor yang merupakan perpanjangan tangan dari negara untuk menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan (aparatur negara), seperti pemerintah lokal, Kepolisian, TNI, dan institusi negara lainnya. Sedangkan aktor non-publik yang disebut dalam tulisan merujuk pada pihak-pihak yang bukan merupakan instrumen negara, seperti organisasi massa dan juga perguruan tinggi.

Secara spesifik, fokus penelitian ini adalah upaya berbagai aktor di Kota Malang dalam merespons isu dan ancaman ISIS. Alasan mengapa Kota Malang menjadi penting adalah karena Malang menjadi salah satu titik yang dipantau untuk

mencegah penyebaran ISIS (Jatimprov, 2014; Widiyanto, 2014). Selain itu, di wilayah Kota Malang sempat beredar Majalah *al-Mustaqbal* yang memuat soal visi dan misi ISIS (Ainun, 2014). Beredar pula video seruan jihad yang menampilkan Salim Mubarak Attamimi Al Indunusiy yang disebut merupakan milisi ISIS yang berasal dari Kota Malang (Wahono, 2014).

Selain itu, pada 25 Maret 2015, tiga orang anggota ISIS ditangkap di Kota Malang. Hal ini menunjukkan fakta mengenai adanya jaringan ISIS di Kota Malang. Lebih dari itu, Kota Malang menjadi penting karena dikenal sebagai kota pendidikan di mana sebagai besar perguruan tinggi yang ada di Malang Raya berada di Kota Malang. Hal itu mengingat, sebagaimana pendapat Hussain dan Saltman (2014), perguruan tinggi merupakan “hotbeds” yang cukup potensial bagi persemaian radikalisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun logika penelitian ini bersifat induktif, yakni peneliti memfokuskan perhatian pada data di lapangan. Sementara itu, ditinjau dari tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung (*direct*) melalui wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka (*open-ended interview*) kepada berbagai pihak.

Pengumpulan data (wawancara) dilakukan antara April hingga Juni 2015 di Kota Malang. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang mampu memberikan data dan informasi terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini, karena keterlibatannya baik secara individual maupun institusional, antara lain (1) unsur pemerintah lokal (Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang); (2) instansi keagamaan dan instansi aparaturnya hukum (Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Kepolisian Resor Kota Malang, dan Komando Distrik Militer 0883/Baladhika Jaya Kota Malang); (3) organisasi masyarakat Islam (Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Malang, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah); dan (4) kalangan perguruan tinggi (Universitas Brawijaya Malang,

Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Islam Malang).

Adapun batasan waktu dalam penelitian ini adalah Juli 2014 hingga Mei 2015. Juli 2014 merupakan awal di mana ISIS dipandang sebagai ancaman seiring dengan beredarnya video seruan jihad ISIS dan adanya deklarasi dukungan terhadap ISIS di Malang. Sementara itu, hingga Mei 2015, pemerintah dan berbagai pihak di Kota Malang masih terus meningkatkan kewaspadaan terhadap isu dan ancaman ISIS terlebih setelah anggota ISIS ditangkap di Kota Malang pada akhir Maret 2015.

Sementara itu, teknik analisis data mengadopsi dari apa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) bahwa analisis data melibatkan empat komponen, yaitu *data collection* (koleksi data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusions drawing and verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Pertama-tama, data dicari dan dikoleksi dari berbagai sumber, terutama melalui wawancara. Data tersebut selanjutnya direduksi agar lebih fokus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Setelah reduksi data, data dikumpulkan dan kemungkinan direduksi kembali. Hal tersebut karena ada data yang dapat langsung digunakan dan ada yang perlu dilakukan pereduksian kembali.

Selanjutnya, data-data disajikan dalam penelitian, kemudian bisa ditarik kesimpulan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dan diverifikasi. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus dan interaktif yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data berlangsung, yang disebut dengan analisis.

Pembahasan

Isu dan Eksistensi ISIS di Kota Malang

Indikasi kehadiran ISIS di Kota Malang telah ada sejak awal 2014. Menurut informasi intelijen (yang tidak dapat disebutkan namanya), pada awal 2014, di sebuah lembaga pendidikan dan pesantren mahasiswa yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kota Malang diketahui berkibar bendera hitam berlogo ISIS. Selain itu, juga terdeteksi simpatisan ISIS di sebuah rumah penduduk di Kelurahan Sukoharjo,

Kecamatan Klojen. Rumah tersebut memasang bendera ISIS dan di jendela rumah ditempel stiker ISIS (Wawancara, 17 April 2015).

Selanjutnya, pada 15 Juli 2014, beredar pamflet dan informasi di media sosial yang berisi undangan Ansharul Khilafah Jawa Timur terkait sosialisasi dan dukungan pada Daulah Islamiyah. Pamflet tersebut selain di-*posting* secara *online* juga disebar di beberapa kampus di Kota Malang. Acara digelar pada 20 Juli 2014 yang rencananya bertempat di Masjid Ibnu Sina, Jalan Veteran, Kota Malang. Akan tetapi, pengurus masjid menolak memberikan izin, hingga akhirnya kegiatan digelar di Masjid Jami' Sulaiman Al Hunaishil di Dusun Sempu, Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pada akhir acara, peserta kemudian dibagikan Majalah Al Mustaqbal, brosur, dan stiker ISIS.

Terlaksananya sosialisasi dan deklarasi tersebut kemudian menjadikan isu ISIS mengemuka di Kota Malang. Sekalipun kegiatan tersebut digelar di wilayah administratif Kabupaten Malang, namun menurut Kabid Integrasi Bangsa Bakesbangpol Kota Malang Tony Noermawan, ada ketakutan tersendiri bahwa pasca deklarasi tersebut ISIS semakin menyebar, terlebih lagi rencana awal kegiatan tersebut digelar di wilayah Kota Malang (Wawancara, 16 April 2015). Keberadaan jaringan ISIS di Kota Malang semakin terbukti dengan ditangkapnya tiga orang anggota dan jaringan ISIS pada 25 Maret 2015. Ketiga orang yang merupakan warga Kota Malang tersebut adalah Abdul Hakim Munabari (AHM), Helmi Alamudi (HA), dan Ahmad Junaidi (AJ).

Selain itu, eksistensi jaringan ISIS di Kota Malang juga tidak terlepas dari Salim Mubarak Attamimi atau Abu Jandal (informasi ditampilkan pada gambar di bawah). Salim disebut-sebut sebagai "panglima ISIS" dari Kota Malang. Berdasarkan catatan Kepolisian Malang, Salim bukanlah orang yang baru, sejak 2010 aktivitasnya telah lama dipantau oleh intelijen. Rekam jejaknya menunjukkan bahwa Salim banyak bergabung dalam kelompok atau jaringan teroris seperti Laskar Jihad, Jamaah Ansharut Tauhid, Front Pembebasan Moro, dan al-Qaeda. (Wawancara intelijen, 17 April 2015; IPAC, 2015).

Respons terhadap Isu dan Ancaman ISIS

Serangkaian indikasi dan eksistensi jaringan ISIS di Kota Malang seperti yang diuraikan di atas selanjutnya direspons oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan berbagai upaya, antara lain: pertama, sebagai upaya *counter* wacana terhadap keberadaan ISIS di Kota Malang, Pemkot Malang menginisiasi sosialisasi dan deklarasi penolakan terhadap keberadaan ISIS pada 13 dan 18 Agustus 2015 dengan mengundang pihak TNI, Kepolisian, MUI, dan FKUB dan melibatkan tokoh masyarakat.

Gambar 1. Naskah Deklarasi Penolakan ISIS di Kota Malang



Sumber: Bakesbangpol Kota Malang, 2015

Kedua, Pemkot Malang bersama berbagai aktor mengaktifkan upaya persuasif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa dan bagaimana ISIS itu. Misalnya, setelah penangkapan tiga anggota ISIS pada 25 Maret 2015, Walikota Malang mengunjungi masyarakat Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang, lokasi penangkapan AJ, untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu, pada 31 Maret 2015 dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Malang ke-101 juga digelar pertemuan yang mengumpulkan seluruh umat beragama di Kota Malang guna membicarakan kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat dalam satu agama.

Kemudian, pada 2 April 2015, menurut informasi Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widiyanto, Walikota memerintahkan untuk mengumpulkan masyarakat

melalui setiap kelurahan untuk diadakan sosialisasi kepada RT/RW (Wawancara, 14 April 2015). Masyarakat diminta melaporkan apabila ada indikasi keberadaan ISIS di lingkungannya. Hal itu diimplementasikan dengan dilaksanakannya Sosialisasi Antisipasi Gerakan dan Pengembangan Organisasi Radikal/ISIS di level kelurahan. Sosialisasi tersebut mengundang seluruh pengurus RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi menghadirkan pembicara dari berbagai elemen, seperti dari unsur Pemkot Malang yang diwakili pihak Bakesbangpol dan Camat serta dari Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), Kemenag, dan FKUB atau MUI. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait ancaman ISIS dan bagaimana mengantisipasi lingkungan masing-masing dari kemungkinan potensi jaringan ISIS. Serta, berbagai upaya persuasif lainnya dalam usaha merespons ancaman ISIS di Kota Malang.

***Local Governance* dalam Merespons ISIS**

Ancaman ISIS tentu tidak bisa dihadapi sendiri oleh aparat Pemkot. Butuh sinergitas dan kerja sama antara berbagai aktor dalam merespons ancaman ISIS, apalagi ISIS dipandang sebagai ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, diperlukan *local governance* yang melibatkan multi aktor dan membutuhkan sinergitas berbagai *stakeholders* dari aktor publik dan aktor non-publik.

Local governance melibatkan adanya *share* kewenangan dan tanggung jawab antara aparatur negara (aktor publik) dengan aktor non-publik terkait tentang tindakan yang perlu dilakukan. *Local governance* dalam konteks tulisan ini dibuktikan dari respons Pemkot Malang yang melibatkan instansi samping, yakni TNI, Kepolisian, dan Kemenag dari aktor publik serta beragam *stakeholders* seperti FKUB, MUI, NU, dan Muhammadiyah dari aktor non-publik. Implementasinya dapat dilihat dari upaya Pemkot Malang memperkuat sinergitas dengan jajaran instansi samping (Kepolisian, TNI, dan Kemenag) dan organisasi massa guna merespons dan menyikapi isu dan ancaman ISIS di Kota Malang.

Hal tersebut diakui oleh Nur Widiyanto sebagai Kabag Humas Pemkot Malang dan Tony Noermawan sebagai Kabid Integrasi Bangsa Bakesbangpol Kota Malang (keduanya sebagai aparat Pemkot Malang), Arya Yudha Setiawan sebagai Komandan Kodim Baladhika Jaya Kota Malang, Imam Solikin sebagai Kasat Intelkam Polres

Malang Kota, serta Amsiyono selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Malang.

Menurut Noermawan (Wawancara, 14 April 2015), dalam merespons ISIS, semua lini bergerak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Terutama dalam hal penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Kepolisian dan TNI memiliki wewenang yang besar. Diakui pula oleh Setiawan (Wawancara, 16 April 2015), Kodim (TNI) sebagai mitra pemerintah di daerah terus bersinergi dengan Pemkot dan aktor lainnya. Posisi TNI, lanjutnya, adalah mendukung segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan TNI dalam mengantisipasi penyebaran ISIS adalah dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh unsur TNI, seperti Babinsa di setiap Koramil. Komando Resor Militer (Korem) Malang juga melakukan sosialisasi ke mahasiswa di perguruan tinggi mengenai *proxy war*. Sosialisasi juga diarahkan kepada sasaran pelajar SMP/SMA se-Kota Malang yang secara umum menyangkut mengenai cinta tanah air, wawasan kebangsaan, narkoba, dan paham-paham radikal seperti ISIS.

Sementara itu, sinergitas jajaran Kepolisian dengan Pemkot salah satunya ditunjukkan dengan kehadiran Kapolresta Malang dalam berbagai kegiatan dan kunjungan yang dilakukan atau diikuti oleh Walikota. Hal tersebut, menurut Solikin (Wawancara, 17 April 2015), merupakan upaya untuk menjaga komunikasi dan sinergitas Kepolisian dengan Pemkot. Tambahan pula, keterlibatan Kepolisian selalu difasilitasi oleh Pemkot misalnya dengan menjadi pembicara di berbagai kegiatan sosialisasi.

Kepolisian juga melakukan upaya kontra-radikal dan deradikalisasi untuk menangkal penyebaran ISIS dan paham lain yang tidak sejalan dengan ideologi NKRI. Bentuk lain keterlibatan Kepolisian adalah hadirnya polisi, termasuk pula intelijennya, dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi rawan. Selain itu, Kepolisian melakukan tindakan represif berupa penangkapan jika ada pihak yang terbukti melakukan tindakan pidana dalam kaitannya dengan keterlibatan dalam jaringan ISIS.

Tidak hanya itu, intelijen yang dimiliki Pemkot, TNI, dan Kepolisian juga saling berbagai informasi. Jaringan intelijen tersebut difasilitasi dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Kominda menjadi salah satu *supplier* informasi terkait

indikasi keberadaan jaringan dan perkembangan isu ISIS yang selanjutnya menjadi bahan dalam perumusan respons dan kebijakan dari masing-masing pihak (Wawancara Tony Noermawan, 16 April 2015; wawancara Imam Solikin, 17 April 2015).

Sinergitas itu juga terwujud dengan Kemenag Kota Malang. Menurut Amsiyono (Wawancara, 29 April 2015), dalam menangkal aliran dan gerakan revivalisme Islam, terutama yang radikal seperti ISIS, Pemkot saling berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan Kemenag. Kemenag juga sinergis dengan aktor lain, seperti misalnya memberi informasi mengenai potensi atau indikasi adanya paham tertentu yang berkembang di masyarakat, dan kemudian aparat terkait memberi tindak lanjut jika melanggar hukum. Selanjutnya, upaya antisipasi ISIS yang dilakukan Pemkot di setiap kecamatan juga melibatkan personel Kemenag. Selain itu, langkah Kemenag Kota Malang tidak dilakukan secara formal namun melalui himbauan dalam khutbah atau ceramah, pengajian, dan siaran radio.

Adapun terkait keterlibatan aktor non-publik seperti FKUB, diakui Ketua FKUB Sudjoko Santoso bahwa Pemkot selalu melibatkan FKUB pada setiap langkah yang menyangkut tugas pokok dan fungsi FKUB sehingga selalu sejalan beriringan dengan Pemkot, Kodim, dan Polres (Wawancara, 27 April 2015). Hal tersebut tidak terlepas dari posisi FKUB yang sekalipun merupakan aktor independen dan dibentuk oleh masyarakat namun seluruh aktivitasnya difasilitasi oleh pemerintah. Salah satu upayanya adalah setiap hari Jumat FKUB menggelar pertemuan untuk membahas radikalisme yang berkembang di Kota Malang.

Sementara itu, keterlibatan MUI menjadi penting karena, menurut Wakil Ketua MUI Noor Chozin Askandar, Pemkot atau pemerintah di level kecamatan tidak memiliki sumber daya manusia untuk melakukan upaya persuasif kepada masyarakat, adapun MUI memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas pemahaman agama (Wawancara, 21 April 2015). Apalagi, menurutnya, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih percaya pada tokoh agama atau ulama dibanding pemerintah. Sehingga, sekalipun upaya merespons ancaman ISIS secara struktural merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, namun secara fungsional menjadi tugas MUI. Hal itu juga diakui Widiyanto bahwa keterlibatan

ulama menjadi poin penting untuk merespons ISIS di tengah masyarakat (Wawancara, 16 April 2015).

Selain itu, dalam merespons ISIS, Pemkot Malang juga menggandeng NU dan Muhammadiyah. Berdasarkan penuturan Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Malang Isroqun Najah, Pemkot selalu menggandeng NU terutama dalam kegiatan keagamaan. NU juga bersinergi dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan MUI. Sejak awal kemunculan indikasi ISIS mendorong NU merapatkan barisan dengan Pemkot, TNI dan Kepolisian sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan ISIS di Kota Malang (Wawancara, 29 April 2015).

Upaya yang dilakukan NU dalam mewaspadai penyebaran ISIS adalah dengan mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa, seperti pengajian, tahlilan, yasinan, dan lainnya. “Hal itu dilakukan sebagai perwujudan komitmen moral NU bahwa NKRI adalah harga mati dan karena itu semua pihak harus bersinergi, ISIS harus dihadapi bersama dan tidak mungkin dengan sendiri,” kata Najah.

Adapun dalam konteks pelibatan Muhammadiyah, kendati secara formal institusional Pemkot Malang tidak menggandeng Muhammadiyah, namun kedua aktor saling sinergi. Menurut Sekretaris PD Muhammadiyah Kota Malang E. M. Sangadji, yang dimaksud dengan pelibatan secara formal adalah tidak adanya surat keputusan atau instruksi khusus untuk menggandeng Muhammadiyah dalam merespons ISIS. Akan tetapi, Pemkot sering mengundang Muhammadiyah untuk melakukan pertemuan dan diskusi bersama pihak lain seperti NU dan MUI terkait masalah ISIS. Hal itu sejalan dengan pandangan Muhammadiyah bahwa dalam merespons ancaman ISIS yang bersifat ideologis, Pemkot harus melibatkan ormas seperti NU dan Muhammadiyah sebagai pihak yang memiliki kapasitas pemahaman agama. Artinya, merespons ancaman ISIS yang bersifat ideologis perlu dihadapi dengan ideologi pula yakni dengan cara-cara persuasif, bukan dengan represif (Wawancara, 18 Mei 2015).

Tantangan *Local Governance* dalam Merespons ISIS

Uraian di atas menunjukkan bagaimana sinergitas antar aktor publik (aparatur negara), yakni Pemkot, TNI, Kepolisian, dan Kemenag dengan aktor non-publik (aktor non-negara), yakni FKUB, MUI, NU, dan Muhammadiyah dalam merespons

isu dan ancaman ISIS yang cukup sinergis. Namun, bagian ini menunjukkan bahwa aktor publik (terutama Pemkot Malang) dengan *stakeholders* perguruan tinggi (PT) justru kurang sinergis dalam memandang dan merespons ancaman ISIS.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa narasumber dari PT, pelibatan PT dalam menyikapi isu dan ancaman ISIS belum nampak. Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) Masykuri Bakri (Wawancara, 30 April 2015), mengungkapkan bahwa hingga wawancara untuk penelitian ini dilakukan, Pemkot belum menggandeng pihaknya dalam merespons dan menyikapi isu dan ancaman ISIS di Kota Malang. Sejak isu ISIS di Kota Malang mengemuka, Unisma tidak pernah menerima undangan ataupun pemberitahuan dari Pemkot untuk membicarakan bersama upaya antisipasi gerakan ISIS.

“Pekot [Malang] lebih cenderung menghadapi ISIS dengan melibatkan aparat keamanan, terutama Kepolisian, seolah memandang bahwa jika aparat keamanan bisa menangani maka hal tersebut sudah cukup dalam mengantisipasi perluasan paham ISIS. Respons dan sikap tersebut menunjukkan bahwa Pemkot tampak sangat gamang dalam menyikapi ISIS. Apalagi menurut kami, ISIS bukanlah ancaman yang serius, masih banyak hal lain yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah.” (Wawancara, 30 April 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhadjir Effendy. Menurutnya, pihaknya belum pernah dilibatkan oleh Pemkot dalam usaha menyikapi ancaman ISIS di Kota Malang (Wawancara, 3 Juni 2015). Hal yang sama pula diperoleh dari Universitas Negeri Malang (UM). Sepanjang pengetahuan Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UM Suparlan Al Hakim, Pemkot Malang tidak atau belum menggandeng PT untuk merespons ISIS (Wawancara, 7 Mei 2015). Demikian pula keterangan yang diperoleh dari Universitas Brawijaya (UB), bahwa sejak isu ISIS mengemuka di Kota Malang sosialisasi yang dilakukan oleh jajaran Pemkot belum menyentuh wilayah kampus (Wawancara Hilmy Mochtar, 13 Mei 2015).

Berbeda dengan itu, Wakil Rektor I UIN Malang M. Zainuddin menilai bahwa sejauh ini UIN dan Pemkot Malang saling sinergi dengan sering melibatkan Pemkot dalam berbagai seminar dan sarasehan tentang radikalisme dan terorisme. Dalam penuturan Zainuddin, tersirat bahwa inisiatif dan respons tersebut merupakan

langkah yang dilakukan pihak UIN dengan berupaya menggandeng Pemkot. “UIN merespons [ISIS] dengan menyeminarkan isu ISIS. . . . Selama ini, UIN dengan pemerintah [Kota Malang] bersinergi. Menggandeng pemerintah dalam seminar-seminar tentang radikalisme,” kata Zainuddin (Wawancara, 12 Mei 2015).

Namun di sisi lain, menurut Zainuddin, bentuk sinergi Pemkot dengan PT serta aktor lain adalah dengan digelarnya Sarasehan dan Deklarasi Bersama Lima Pilar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di UIN Malang pada 29 April 2015. Lima pilar Kamtibmas yang dimaksud adalah TNI, Polri, Pemda, akademisi, dan tokoh agama. Karena itu pula, kegiatan tersebut diikuti oleh kelima unsur tersebut dari wilayah Malang Raya. Kegiatan itu, oleh Zainuddin, disebut merupakan bentuk sinergitas berbagai aktor di Kota Malang secara khusus, dan Malang Raya secara umum. Sekaligus pula merupakan bentuk upaya dalam memperkuat komitmen dalam merespons ancaman ISIS sebagai masalah bersama. Akan tetapi, perlu ditegaskan, inisiatif kegiatan tersebut bukan berasal dari Pemkot Malang, melainkan dari pihak UIN dan Kapolresta Malang.

Perbedaan pernyataan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara *stakeholders* PT. Pihak Unisma, UMM, UM, dan UB memandang bahwa inisiatif respons terkait isu dan ancaman ISIS seharusnya berasal dari pemerintah kota. Sementara pihak UIN lebih memandang bahwa inisiatif tidak harus berasal dari pemerintah. Namun dari hasil wawancara kepada kelima *stakeholders* PT dapat disimpulkan bahwa dalam merespons ancaman ISIS di Kota Malang Pemkot Malang belum menggandeng dan melibatkan aktor PT. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa aktor publik (terutama Pemkot Malang) kurang sinergis dengan jajaran perguruan tinggi untuk merespons isu dan ancaman ISIS.

Hal tersebut sejatinya dapat dipahami karena Pemkot dan PT adalah dua aktor yang memiliki otoritas berbeda serta secara fungsional juga berbeda sehingga Pemkot dan PT berpotensi memiliki pandangan yang berbeda pula terkait ISIS. Pemkot Malang memandang ISIS sebagai ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikasi keberadaan paham dan jaringan ISIS di Kota Malang ditemukan di masyarakat sehingga dalam meresponsnya perlu melibatkan aparat aktor publik dan aktor-aktor lain yang aktivitasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti FKUB, MUI, NU, dan Muhammadiyah. Adapun *stakeholders* PT dipandang

cenderung tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat secara luas. Apalagi hingga hasil penelitian ini ditulis, belum ada bukti kuat indikasi keberadaan jaringan ISIS di PT yang ada di Kota Malang, selain jaringan organisasi atau gerakan revivalis Islam lain yang lebih moderat, seperti misalnya Hizbut Tahrir Indonesia.

Hal itu itu dipertegas oleh pernyataan Al Hakim bahwa semua aksi dan tindakan memang harus berasal dari pemerintah dan harus dijawab pula oleh pemerintah (Wawancara, 7 Mei 2015). Selain itu, menurut *stakeholders* PT, ISIS bukanlah ancaman serius. Menurut Rektor Unisma Masykuri Bakri, ISIS bukanlah persoalan besar dan ada banyak masalah yang jauh lebih perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah dibanding isu ISIS. Senada dengan itu, menurut Rektor UMM Muhadjir Effendy, ancaman lebih serius yang patut diwaspadai oleh pemerintah, terutama PT, dibanding ISIS adalah adanya sel-sel tidur komunisme. Menurutnya, Indonesia bukanlah *Darul Harb* (wilayah perang) dari ISIS sehingga ISIS tidak perlu dipandang sebagai persoalan besar.

“Ancaman yang lebih serius dibanding ISIS adalah bahaya komunisme di kalangan mahasiswa. Bahaya komunisme itu muncul seiring dengan mulai banggunya sel-sel tidur komunisme. Sel-sel tidur komunisme itu semakin menunjukkan eksistensinya dengan menjadi aktivis-aktivis partai politik dan ormas serta mulai menyasar mahasiswa. Dalam konteks Kota Malang, ancaman sel-sel tidur komunisme itu nyata, salah satunya dengan adanya Kursus Marxisme di kalangan mahasiswa. (Wawancara Muhadjir Effendy, 3 Juni 2015).

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dan persepsi ancaman terhadap ISIS antara aktor publik (khususnya Pemkot) dengan *stakeholders* PT. Perbedaan pandangan dan persepsi ancaman tersebut menjadi tantangan dalam mengefektifkan respons terhadap isu dan ancaman ISIS di Kota Malang. Perbedaan pandangan dan persepsi ancaman tersebut bahkan bukan tidak mungkin juga terkait pada isu dan konteks yang lain yang selanjutnya berdampak pada tidak sinergisnya kedua aktor dalam konteks yang lebih luas.

Terlepas dari itu, serangkaian respons yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa dalam merespons isu dan ancaman ISIS, pendekatan yang dilakukan oleh Pemkot Malang mencakup *multiple and multilevel actors*. *Multiple actors* ditunjukkan dengan terlibatnya beragam aktor, baik aktor publik dan aktor non-

publik. *Multilevel actors* ditunjukkan dengan terlibatnya berbagai pihak di berbagai level mulai dari level kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Adapun wewenang dan tanggung jawab dari serangkaian bentuk respons tersebut tidak semata terpusat pada Pemkot Malang yang berada di *top level*, melainkan didistribusikan antara pemerintah dan pihak di bawahnya sesuai dengan proporsi yang dimiliki masing-masing.

Sebagaimana kerangka pendekatan *local governance* bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditangani dan diselesaikan sendiri oleh pemerintah lokal sehingga menuntut perlunya keterlibatan dan sinergitas dengan aktor lain untuk *goes hand by hand* dalam menghadapinya, seperti isu dan ancaman ISIS. Untuk itulah, dibutuhkan keterlibatan *local multi-agency* melalui hubungan koordinatif *strategic partnerships*.

Kesimpulan

Tujuan ISIS adalah untuk mendirikan kekhilafahan Islam di Irak dan Suriah. Akan tetapi, upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan berbagai tindakan radikal dan kejahatan kemanusiaan. Propaganda dengan memanfaatkan berbagai fitur teknologi informasi menjadikan ideologi ISIS tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, yang selanjutnya menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah segera merespons dengan melarang eksistensi ISIS karena dinilai bertentangan dengan ajaran ideologi Pancasila, ajaran Islam *mainstream*, dan kebhinnekaan di Indonesia. Respons pemerintah pusat tersebut selanjutnya ditindaklanjuti di level provinsi dan kabupaten/kota. Respons pemerintah kabupaten/kota (level lokal) menjadi penting karena merupakan aktor bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Lebih lanjut, ISIS sebagai ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat tentu tidak bisa dihadapi sendiri oleh pemerintah lokal sehingga memerlukan keterlibatan dan sinergitas berbagai aktor dalam kerangka *local governance*. Dalam konteks tulisan ini yaitu Kota Malang, *local governance* tersebut terimplementasi dari keterlibatan aktor publik seperti Pemkot, TNI, Kepolisian, dan Kemenang serta aktor non-publik seperti MUI, FKUB, NU, dan Muhammadiyah dalam merespons isu dan ancaman ISIS.

Penelitian menemukan bahwa aktor publik dan aktor non-publik yang disebut di atas cukup sinergis. Sinergitas tersebut dibuktikan dengan keterlibatan masing-masing pihak sesuai dengan apa yang menjadi tugas, fungsi, dan wewenangnya. Hal itu sejalan dengan konsepsi *local governance* bahwa suatu masalah tidak dapat diselesaikan sendiri oleh *local government* sehingga perlu melibatkan beragam aktor (*multiple actors*).

Selain itu, juga melibatkan *multilevel* aktor yang ditunjukkan dengan terlibatnya jajaran aktor di berbagai level mulai dari level kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW dalam berbagai respons yang sifatnya persuasif. Upaya persuasif menjadi penting karena ancaman ISIS lebih didefinisikan sebagai ancaman ideologis sehingga pemahaman masyarakat perlu dibentengi agar tidak mudah terpengaruh dengan pemahaman baru, doktrin, dan narasi “jihad” ala ISIS.

Namun demikian, adanya perbedaan pandangan dan persepsi ancaman dalam memandang ISIS antara aktor publik dengan *stakeholders* PT menjadi tantangan tersendiri dalam mengefektifkan respons terhadap isu dan ancaman ISIS di Kota Malang. Perbedaan pandangan dan persepsi ancaman itu menunjukkan belum sinergisnya aktor publik, dalam hal ini khususnya Pemkot Malang, dengan *stakeholders* PT yang menjadi salah satu aktor penting dalam merespons berbagai isu yang ada di masyarakat, termasuk isu dan ancaman ISIS.

Hal di atas sekaligus menjadi saran tulisan ini kepada pihak terkait untuk lebih mengintensifkan komunikasi dalam usaha mewujudkan sinergitas antar aktor dalam menghadapi atau merespons berbagai hal. Apalagi kalangan perguruan tinggi merupakan aktor intelektual yang mengedepankan sudut pandang akademik dalam memahami permasalahan dan fenomena yang selanjutnya dapat menjadi *input* bagi perumusan kebijakan pemerintah lokal atau aktor publik lainnya.

Daftar Pustaka

Ainun, Yatimul. 2014. *Majalah ISIS Beredar di Malang*.
<http://regional.kompas.com/read/2014/08/06/17202971/Majalah.ISIS.Beredar.di.Malang>. Akses: 14 Februari 2015.

- Berger, J. M. 2014. *How ISIS Games Twitter*.
<http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-media-strategy/372856/>. Akses: 04 Oktober 2014.
- Branco, Erin. 2014. *ISIS Executions: 1,000 Iraqi Civilians Killed In ISIS-Controlled Towns Since June, Hundreds More Found In Mass Graves*.
<http://www.ibtimes.com/isis-executions-1000-iraqi-civilians-killed-isis-controlled-towns-june-hundreds-more-found-1718076>. Akses: 11 Februari 2015.
- Crawford, Jamie. 2015. *U.S. Officials Warn of Increase of ISIS Foreign Fighters*.
<http://edition.cnn.com/2015/02/10/politics/isis-foreign-fighters-combat/>. Akses: 11 Februari 2015.
- Hussain, Ghaffar, dan Erin Marie Saltman. 2014. *Jihad Trading: A Comprehensive Analysis of Online Extremism and How to Counter It*. New York: Quilliam.
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2015. *Indonesia's Lamongan Network: How East Java, Poso and Syria are Linked*. IPAC Report No. 18, 15 April 2015
- Martel, Frances. 2014. *Indonesia Criminalizes Support for ISIS*.
<http://www.breitbart.com/national-security/2014/08/06/indonesia-criminalizes-support-for-isis/>. Akses: 11 Februari 2015.
- Miles, Mathew B, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, Nofika Dian. 2014. *Ali Fauzi: Jawa Timur Rahim Terorisme*.
<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/04/058604589/Ali-Fauzi-Jawa-Timur-Rahim-Terorisme>. Akses: 14 Februari 2015.
- Pemprov Jatim. 2014. *Cegah ISIS, Polda Jatim Pantau Tujuh Titik*.
<http://www.jatimprov.go.id/site/cegah-isis-polda-jatim-pantau-tujuh-titik/>. Akses: 14 Februari 2015.
- Shah, Anwar (ed.). 2006. *Local Governance in Developing Countries*. Washington DC.: The World Bank.
- Wahono, Tri (ed.). 2014. *Video Seruan Jihad Milisi ISIS Asal Malang Muncul di YouTube*.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/08/13/11440441/Video.Serua>

n.Jihad.Milisi.ISIS.Asal.Malang.Muncul.di.YouTube. Akses: 14 Februari 2015.

Widianto, Eko. 2014. *Pendukung Pemimpin Milisi ISIS di Baiat di Malang*. <http://www.tempo.co/read/news/2014/07/21/078594528/pendukung-pemimpin-milisi-isis-dibaiat-di-malang>. Akses: 14 Februari 2015.